

RINGKASAN

Kemiskinan di Indonesia bagian timur, khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat, masih menjadi tantangan pembangunan yang signifikan. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk mendorong peningkatan layanan publik dan pembangunan ekonomi, tingkat kemiskinan di kedua provinsi tersebut masih berada pada level tertinggi secara nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan pengaruh Dana Otsus, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terhadap kemiskinan di Papua dan Papua Barat pada periode 2016–2023. Penelitian menggunakan data sekunder dari BPS dan Kementerian Keuangan, serta dianalisis menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect model* dan *random effect model*. Variabel yang digunakan meliputi kemiskinan sebagai variabel dependen, serta Dana Otsus, PDRB, rata-rata lama sekolah (RLS), dan angka harapan hidup (AHH) sebagai variabel independen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Otsus tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kedua provinsi, yang berarti peningkatan Dana Otsus tidak berpotensi menurunkan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga tidak berpengaruh signifikan. Sementara itu, variabel pendidikan menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Papua Barat, sedangkan di Provinsi Papua tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Dan kesehatan menunjukkan hubungan negatif terhadap kemiskinan di kedua Provinsi.

Secara praktis, penelitian ini menekankan perlunya optimalisasi Dana Otsus untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, serta pembangunan karakter dan kapasitas SDM yang mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sektor ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, dan industri kecil. Dalam bidang kesehatan dan pendidikan, peningkatan fasilitas layanan dasar, distribusi tenaga pendidik dan tenaga medis, serta penyediaan layanan kesehatan bergerak dan ambulan udara di wilayah sulit dijangkau menjadi strategi yang relevan. Pendekatan terpadu lintas sektor diperlukan agar kebijakan pengurangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di Papua dan Papua Barat.

Kata Kunci : Kemiskinan, Dana Otonomi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup.

SUMMARY

Poverty in Eastern Indonesia, particularly in the Provinces of Papua and West Papua, remains a major development challenge. Although the government has allocated Special Autonomy Funds (Otsus) to stimulate improvements in public services and economic development, poverty rates in both provinces remain the highest nationally. This study aims to analyze and compare the effects of Special Autonomy Funds, economic growth, education, and health on poverty in Papua and West Papua during the 2016–2023 period. The research employs secondary data from Statistics Indonesia (BPS) and the Ministry of Finance, and is analyzed using panel data regression with both fixed effect and random effect models. The variables used include poverty as the dependent variable, and Special Autonomy Funds, GRDP, average years of schooling (RLS), and life expectancy (AHH) as independent variables.

The findings indicate that Special Autonomy Funds have no significant effect on poverty in either province, implying that increases in Otsus allocations do not necessarily contribute to poverty reduction. Economic growth is also found to have no significant effect. Meanwhile, the education variable shows a significant negative effect on poverty in West Papua Province, whereas in Papua Province it has no significant impact. The health variable demonstrates a negative relationship with poverty in both provinces.

Practically, this study underscores the need to optimize the use of Special Autonomy Funds for community economic empowerment, MSME development, and the strengthening of human resource character and capacity to adapt to economic transformation. Local governments also need to reinforce key local economic sectors such as agriculture, fisheries, and small-scale industries. In the fields of health and education, improving basic service facilities, ensuring equitable distribution of teachers and medical personnel, and providing mobile health services and air ambulances for remote areas are relevant strategies. An integrated cross-sectoral approach is required to ensure that poverty reduction policies can operate more effectively and sustainably in Papua and West Papua.

Keywords: Poverty, Special Autonomy Funds, Economic Growth, Average years of schooling, Life Expectan